

Fintech Ilegal Incar Masyarakat Terdampak Covid

Tanggal : Senin , 28 September 2020
Media : Media Indonesia
Halaman : 11
Wartawan : Gana Buana
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Tongam Lumban Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi OJK), Piter Abdullah (Direktur Riset CORE)
Rubrik : Ekonomi Digital
Topik : Fintech Ilegal

Fintech Ilegal Incar Masyarakat Terdampak Covid

Pada bulan ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

GANA BUANA
gana@mediaindonesia.com

TAWARAN dari perusahaan *financial technology (fintech)* ilegal dan investasi tanpa izin masih bermunculan di masyarakat dan mengincar kalangan yang pendapatannya terdampak oleh pandemi covid-19.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi kembali memblokir ratusan perusahaan *fintech* ilegal untuk melindungi masyarakat dari kerugian.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan Satgas Waspada Investasi dalam operasinya menemukan 126 *fintech peer to peer lending* ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin, pada bulan ini.

"Kami masih menemukan *fintech lending* ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. *Fintech lending* dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukan solusi bagi masyarakat," ujar Tongam dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (25/8).

Menurut dia, pinjaman *fintech lending* ilegal selalu mengenakan bunga tinggi dan jangka waktu pinjaman

pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon seluler untuk mengintimidasi saat penagihan.

Kini identitas semua temuan satgas tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk blokir akses di laman internet dan aplikasi jaringan seluler. "Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas *fintech lending* ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," kata dia.

Satgas pun mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan *fintech lending* terdaftar dan berizin OJK melakukan penawaran melalui SMS sesuai dengan ketentuan OJK. "Jika ada penawaran pinjaman dana *fintech lending* melalui SMS, berarti itu dilakukan *fintech lending* ilegal yang sebaiknya dihindari."

Dengan pemblokiran tersebut, hingga saat ini total *fintech* ilegal yang ditangani satgas untuk ditutup sejak 2018 sampai September 2020 mencapai 2.840 entitas.

Pastikan berizin

Selain kegiatan *fintech lending* ilegal, Satgas Waspada Investasi menghentikan 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas berwenang dan berpotensi merugikan masya-

rakat karena menipu dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang tinggi.

Salah satu entitas yang diminta ditutup ialah aplikasi *Alimama Indonesia* yang belakangan ramai diberitakan karena diduga menipu dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja.

Satgas Waspada Investasi mengimbau masyarakat agar sebelum investasi memastikan dahulu pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari otoritas berwenang seperti OJK. Itu bisa dilihat melalui *Investor Alert Portal* pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Secara terpisah, Direktur Center of Reform on Economic Indonesia Piter Abdullah menambahkan, selain izin jelas dari OJK, masyarakat perlu melihat pemilik dan kondisi keuangannya seperti apa.

"Indikasinya yang dijadikan patokan yakni lembaga yang menawarkan suku bunga terlalu tinggi harus diwaspadai. Intinya jangan mencari rente. Jangan mencari yang janji terlalu tinggi karena justru berbahaya," jelas dia.

Masyarakat yang hendak meminjam sebaiknya hati-hati. "Harus dipahami betul kebutuhannya seperti apa. Jangan memercayai lembaga yang tampak memberikan solusi, tapi justru membawa masalah baru," tutupnya. (Ins/S-3)